

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Burton Simatupang, Richard, 2007, *“Aspek hukum dalam bisnis”*, Rineka cipta, Jakarta,
- Lumban Tobing, G.H.S, 2007, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyoto, 2012, *“Perjanjian, Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang harus di Kuasai”*, Cakrawala Media, Yogyakarta
- Pachta W, Andjar, dkk, 2012, *“Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman Regulasi Pendirian dan Modal Usaha”*, Kencana Prenada Media Group-Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemardjono, Maria S.W. 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Untung, Budi, 2003, *“Hukum Koperasi dan Peranan Notaris Indonesia”*, Andi Offset, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke-4, Sekretariat Negara, 2003

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3502

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5355

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembar Negara Nomor 4432 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan menengah nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;  
Peraturan Pemerintah Nomor 01/Per/MKUKM/I/2006 tentang Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 28/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian;

### C. Internet

“*Sejarah Koperasi Indonesia*” <https://who21.wordpress.com/2013/11/02/sejarah-koperasi-di-indonesia/>, diakses tanggal 20 Januari 2016

Joko Susilo, “*MK Batalkan Undang-Undang tentang perkoperasian*”, <http://m.antaranews.com/berita/436287/mk-batalkan-undang-undang-tentang-pengkoperasian>, diakses tanggal 26 Januari 2016.

Anif Hidayatullah, “*Nasib Koperasi Pasca Pembatalan UU/ Inisi*”,  
<http://www.insisi.com/2014/07/nasib-koperasi-pasca-pembatalan-uu.html>, diakses tanggal 26 Januari 2016.

“*Surat Edaran Pembatalan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*”<https://kopkarti.wordpress.com/2014/08/18/surat-edaran-pembatalan-uu-no-17-tahun-2012-tentang-perkoperasian/>  
diakses pada tanggal 1 Mei 2016